

Kendalikan Banjir & Pasokan Kebutuhan Irigasi, Bappenas RI Dukung Pembangunan Bendungan Tanbu



Sumber gambar:

<https://jurnalkalimantan.com/kendalikan-banjir-pasokan-kebutuhan-irigasi-bappenas-ri-dukung-pembangunan-bendungan-tanbu/>

Air menjadi kebutuhan mendasar dalam mengembangkan budidaya pertanian, termasuk di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Di sisi lain, ancaman musibah banjir mengintai saban tahun. Tahun ini saja sebanyak 92 desa tergenang banjir di 12 Kecamatan, dan lebih 20 ribu jiwa diungsikan. Direktur pengairan dan irigasi Bappenas Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI, Abdul Malik Sadat Idris mengatakan, keinginan untuk bertani cukup tinggi di Tanah Bumbu. Sehingga, sangat memungkinkan untuk dibangun bendungan.

Salah satu bendungan yang dicanangkan bakal dibangun adalah bendungan Sungai Kusan. “Permasalahan banjir kebutuhan air bersih, maupun potensi irigasi di Tanah Bumbu ini sepertinya cukup prospek ya, memang harus segera ditangani,” kata Abdul Malik usai menerima Kunjungan Kerja (Kunker) Bupati Tanah Bumbu, HM Zairullah Azhar di ruang rapat Bappenas RI Jakarta Barat, Rabu (24/11/2021). Dia mendukung pembangunan bendungan Sungai Kusan, namun harus dirembugkan lebih lanjut bersama Kementerian PUPR.

Potensi sumber daya air di Kabupaten Tanah Bumbu ini, kata Abdul Malik cukup besar, akan tetapi di satu sisi memiliki daya rusak besar yang harus bisa ditangani. “Ini

untuk prosedur pembangunan bendungan ini, itu sudah ada regulasi nya, iya tadi di Kementerian PUPR, nanti kami akan berkoordinasi lebih lanjut,” janji Abdul Malik. “Tentu ini kesiapan project ya masalah teknis tentu dibahas, karena membangun bendungan itu mulai sudah ada dialog dengan sertifikasi desain izin konstruksi, dan masalah lingkungan,” terangnya. Sehingga, kata dia, kelancaran infrastruktur yang menghubungkan ke dua daerah sangat penting untuk terus mendapatkan perhatian. Sebagai contoh, berfungsinya Jembatan Alalak Kabupaten Barito Kuala (Batola), kini makin memperlancar gerak perekonomian terutama di provinsinya tersebut. Sejumlah warga di Kecamatan Alalak, khususnya yang memiliki usaha di sekitar area pembangunan, ikut berbangga atas selesainya jembatan yang menghabiskan dana Rp278 miliar ini. “Kami sangat bangga atas ikon baru ini. Saya berharap jembatan ini lekas dibuka, sehingga usaha kami bisa semakin lancar, mengingat selama 3 tahun dibangun, setiap hari kawasan Handil Bakti mengalami kemacetan parah,” ungkap H. Uci, pemilik usaha kebutuhan pokok. Hal senada diungkapkan Eka, ibu rumah tangga di Kelurahan Handil Bakti. “Jembatan Sungai Alalak selain bisa dijadikan spot baru untuk berfoto, juga akan memperlancar akses dari dan ke Banjarmasin,” ujarnya.

Sementara pada sumber yang berbeda disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa Dalam empat tahun (2015-2019), pembangunan infrastruktur menjadi salah satu program prioritas Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejak tahun 2015, pemerintah mengalihkan belanja subsidi menjadi belanja produktif, yakni pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Anggaran infrastruktur terus meningkat dari Rp 155 triliun pada 2014 menjadi sekitar Rp 410 triliun pada tahun 2018.

Dikutip dari rilis resmi Biro Komunikasi Publik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan turut berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi Indonesia serta peningkatan daya saing nasional.

“Kebutuhan masyarakat akan ketersediaan infrastruktur masih sangat besar. Pemerintah menargetkan daya saing Indonesia bisa berada pada peringkat ke-40. Pada tahun 2019, fokus Pemerintah pada pengembangan SDM Indonesia, dengan tetap melanjutkan pembangunan infrastruktur,” jelas Menteri Basuki dalam Jumpa Pers 4 Tahun Kerja Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang turut dihadiri sejumlah menteri di Jakarta, Selasa (23/10).

Kementerian PUPR melalui Ditjen Bina Marga telah berhasil menyelesaikan pembangunan jalan nasional sepanjang 3.432 km termasuk jalan di perbatasan Papua, Kalimantan, dan NTT. Kemudian telah dibangun jalan tol baru sepanjang 941 km dengan target akhir 2019 mencapai 1.852 km. Selain membangun jembatan bentang panjang,

jembatan gantung yang menghubungkan antar desa juga dibangun. Dalam mendukung ketahanan air dan pangan, target pembangunannya 65 bendungan, tahun 2018 sebanyak 8 bendungan telah rampung yakni Bendungan Paya Seunara dan Rajui di Aceh, Jatigede di Jabar, Bajulmati dan Nipah Jatim, Titab di Bali, Teritip di Balikpapan, Raknamo dan Tanju di NTB. Bendungan lainnya akan selesai bertahap hingga tahun 2023. Pembangunan 65 bendungan akan menambah layanan irigasi waduk sebanyak 160.000 hektare, kapasitas tampung 2,11 miliar m³, tersedia air baku sebanyak 3,02 m³/detik dan menghasilkan potensi energi sebesar 145 MW.

“Terdapat lima aspek penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yakni benih, pupuk, tanah, penyuluhan, dan air. Apapun yang dilakukan dalam pertanian tanpa air tidak akan terwujud. Karena itu kita bangun bendungan, embung dan jaringan irigasi,” kata Menteri PUPR.

Sumber berita:

1. <https://jurnalkalimantan.com/kendalikan-banjir-pasokan-kebutuhan-irigasi-bappenas-ri-dukong-pembangunan-bendungan-tanbu/>, *Kendalikan Banjir & Pasokan Kebutuhan Irigasi, Bappenas RI Dukong Pembangunan Bendungan Tanbu*, 24 November 2021.
2. <https://www.idxchannel.com/economics/pembangunan-infrastruktur-rampung-satu-per-satu-jokowi-pondasi-untuk-kemajuan-indonesia>, *Pembangunan Infrastruktur Rampung Satu per Satu, Jokowi: Pondasi untuk Kemajuan Indonesia*, 18 November 2021.

Catatan Berita:

Pengaturan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional.

Definisi Umum mengenai hal-hal terkait Perencanaan Pembangunan

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.¹

¹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 1 angka (1)

- Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.²
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan, yaitu RPJM Nasional I Tahun 2005–2009, RPJM Nasional II Tahun 2010–2014, RPJM Nasional III Tahun 2015–2019, dan RPJM Nasional IV Tahun 2020– 2024.³
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk perioda 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memerhatikan RPJM Nasional.⁴

Program Pembangunan Nasional

- Program Pembangunan Nasional periode 2005 – 2025 dilaksanakan sesuai dengan RPJP Nasional.⁵
- Rincian dari program pembangunan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada Lampiran Undang-Undang ini.⁶
- RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah Pembangunan Jangka Panjang Daerah.⁷
- RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Kepala Daerah.⁸
- RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memerhatikan RPJM Nasional.⁹

² Ibid, Pasal 1 angka (2)

³ Ibid, Pasal 1 angka (3)

⁴ Ibid, Pasal 1 angka (4)

⁵ Ibid, Pasal 2 ayat (1)

⁶ Ibid, Pasal 2 ayat (2)

⁷ ibid, Pasal 6 ayat (1)

⁸ ibid, Pasal 6 ayat (2)

⁹ ibid, Pasal 6 ayat (3)

- Pemerintah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Nasional.¹⁰
- Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.¹¹
- Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.¹²

Rincian Program Pembangunan

Kondisi Umum

- Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran ganda, yaitu sebagai modal pembangunan dan, sekaligus, sebagai penopang sistem kehidupan. Adapun jasa-jasa lingkungan meliputi keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, pengaturan air secara alamiah, keindahan alam, dan udara bersih merupakan penopang kehidupan manusia. Hasil pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup telah mampu menyumbang 24,8 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan 48 persen terhadap penyerapan tenaga kerja. Namun, pengelolaan sumber daya alam tersebut masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis. Menurunnya daya dukung dan ketersediaan sumber daya alam juga terjadi karena kemampuan iptek yang rendah sehingga tidak mampu mengimbangi laju pertumbuhan penduduk.¹³
- Kondisi sumber daya hutan saat ini sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan akibat meningkatnya praktik pembalakan liar (illegal logging) dan penyelundupan kayu, meluasnya kebakaran hutan dan lahan, meningkatnya tuntutan atas lahan dan sumber daya hutan yang tidak pada tempatnya, meluasnya perambahan dan konversi hutan alam, serta meningkatnya penambangan resmi maupun tanpa izin. Tahun 2004, kerusakan hutan dan lahan di Indonesia sudah mencapai 59,2 juta hektar dengan laju deforestasi setiap tahun mencapai 1,6-2 juta hektar.¹⁴

¹⁰ ibid, Pasal 7 ayat (1)

¹¹ ibid, Pasal 7 ayat (2)

¹² ibid, Pasal 7 ayat (3)

¹³ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 1

¹⁴ Ibid, Lampiran, Bab II. Kondisi Umum, I. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, 2

Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005-2025

- Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan sehingga pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah, dengan tingkat pengangguran terbuka yang tidak lebih dari 5 persen dan jumlah penduduk miskin tidak lebih dari 5 persen.¹⁵
- Meningkatnya kualitas sumber daya manusia, termasuk peran perempuan dalam pembangunan. Secara umum peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan manusia (IPM) dan indeks pembangunan gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.¹⁶
- Terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah Indonesia. Sektor pertanian, dalam arti luas, dan pertambangan menjadi basis aktivitas ekonomi yang dikelola secara efisien sehingga menghasilkan komoditi berkualitas, industri manufaktur yang berdaya saing global, motor penggerak perekonomian, serta jasa yang perannya meningkat dengan kualitas pelayanan lebih bermutu dan berdaya saing.¹⁷
- Tersusunnya jaringan infrastruktur perhubungan yang andal dan terintegrasi satu sama lain. Terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang andal dan efisien sesuai kebutuhan, termasuk hampir sepenuhnya elektrifikasi rumah tangga dan elektrifikasi perdesaan dapat terpenuhi. Terselenggaranya pelayanan pos dan telematika yang efisien dan modern guna terciptanya masyarakat informasi Indonesia. Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air.¹⁸

¹⁵ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 1

¹⁶ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 2

¹⁷ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 3

¹⁸ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 4

- Meningkatnya profesionalisme aparatur negara pusat dan daerah untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, serta profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.¹⁹
- Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dicerminkan oleh tetap terjaganya fungsi, daya dukung, dan kemampuan pemulihannya dalam mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari.²⁰
- Terpeliharanya kekayaan keragaman jenis dan kekhasan sumber daya alam untuk mewujudkan nilai tambah, daya saing bangsa, serta modal pembangunan nasional.²¹
- Meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup untuk menjaga kenyamanan dan kualitas kehidupan.²²
- Peningkatan dan pengembangan produk-produk unggulan sesuai dengan potensi di masing-masing wilayah dilakukan melalui penumbuhan klaster-klaster industri dalam rangka memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif masing-masing daerah melalui pengembangan pasar bagi komoditas dan hasil produksi klaster, meningkatkan akses permodalan, memperluas jaringan dan keterkaitan, memanfaatkan riset dan teknologi, pengembangan kelembagaan dan pematapan iklim bisnis yang kondusif. Selain itu akan dikembangkan pula wilayah-wilayah yang memiliki potensi maritim termasuk potensi wisata bahari dengan menerapkan manajemen modern; serta menumbuhkan lembaga-lembaga pendukung ekonomi berbasis maritim seperti asuransi, perbankan, teknologi, industri perkapalan, pendidikan/training kemaritiman, serta kerjasama antar negara.²³
- Kepariwisata dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, serta

¹⁹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, B. Terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera, 5

²⁰ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 1

²¹ Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 2

²² Ibid, Lampiran, Bab IV. Arah, Tahapan, Dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, F. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari, 3

²³ Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005 – 2025, Bagian II Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang, VII. Pembangunan Daerah, 4

memberikan perluasan kesempatan kerja. Pengembangan kepariwisataan memanfaatkan keragaman pesona keindahan alam dan potensi nasional sebagai wilayah wisata bahari terluas di dunia secara arif dan berkelanjutan, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya bangsa.²⁴

²⁴ Lampiran UU No. 17 Tahun 2007 Tentang RPJPN Tahun 2005 – 2025, Bab IV Arah, Tahapan, dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Tahun 2005 - 2025, IV.1.2 mewujudkan Bangsa Yang Berdaya Saing, B. Memperkuat Perekonomian Domestik dengan Orientasi dan Berdaya Saing Global, 22